BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana pembangunan dibidang pertanian menjadi prioritas utama karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategi dalam pembangunan nasional. UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah di sektor pertanian (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2013: 2).

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar yang memberikan kontribusi sebesar 22,74% dibandingkan sektor-sektor lainnya yaitu sebesar 23,12% (BPS, 2014:625). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah. Tanaman pangan hampir tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, meskipun sentral tanaman pangan ini terdapat di beberapa daerah tertentu (Purwono, 2010:7).

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) merupakan tanaman perkebunan yang memegang peranan penting bagi Indonesia sebagai komoditas andalan untuk ekspor maupun komoditas yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Minyak kelapa sawit mempunyai beberapa kegunaan antara lain untuk industri pangan dan non pangan. Limbah hasil olahan kelapa sawit dapat juga dimanfaatkan sebagai pupuk dan makanan ternak sehingga banyak masyarakat melakukan budidaya kelapa sawit.

Salah satu produk perkebunan terbesar Indonesia saat ini adalah kelapa sawit, produksi kelapa sawit Indonesia sekarang ini memenuhi 60% kebutuhan konsumsi dunia, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia hingga 2013 mencapai 10,5 juta ha termasuk didalamnya perkebunan besar dan perkebunan rakyat, tapi peningkatan pesat produksi kelapa sawit mulai terlihat kurang lebih 20 tahun

terakhir, dengan produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) 27,7 juta ton pada tahun 2013 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014: 17).

Beberapa tahun kedepan pemerintah berencana untuk memperluas perkebunan kelapa sawit dengan target produksi pada tahun 2020 mencapai 52 juta ton pertahun. Salah satu alasan untuk memperluas perkebunan kelapa sawit karena prediksi peningkatan permintaan khususnya di pasar internasional atas minyak nabati dari kelapa sawit, yang bukan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan industri pangan dan industri kosmetik tetapi telah meluas untuk kebutuhan energi. Sejalan dengan itu dibutuhkan bibit yang baik dan sehat untuk menunjang pertumbuhan kelapa sawit demi tercapainya perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Seiring program pemerintah dalam upaya perluasan perkebunan kelapa sawit, Sumatera Barat akan memperluas perkebunan sawit hingga mencapai 500.000 ha pada tahun 2020 (Sawit Watch, 2008). Sedangkan pada tahun 2012 Sumatera Barat baru memiliki luas perkebunan kelapa sawit 358.030 ha, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar milik perusahaan swasta (BPS Sumatera Barat, 2013).

Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak tertinggi per satuan luasnya dibandingkan jenis tanaman lainnya, tanaman kelapa sawit memiliki potensi minyak sekitar 9-10 ton/ha/tahun dan merupakan komoditi perkebunan yang begitu dekat dengan kehidupan petani bukan dianggap sebagai salah satu mata pencaharian yang mampu mensejahterakan kehidupan pemiliknya (PPKS, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa peluang pasar kelapa sawit sangat bagus bagi Indonesia. Saat ini produksi CPO (*Crude palm oil*) Indonesia sekitar 26,8 juta ton pertahun. Dengan produksi ini, Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar didunia, berhasil menggeser kedudukan Malaysia yang produksinya mencapai 16 juta ton CPO per tahun, meskipun ada juga kebun-kebun kelapa sawit yang merupakan investasi perusahaan swasta Malaysia di Indonesia (Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian, 2010: 19).

Upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat dalam program revitalisasi sektor perkebunan yang dilakukan melalui perluasan peremajaan dan rehabilitas tanaman perkebunan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing pada komoditas sektor perkebunan dengan meningkatkan produktivitas serta mengembangkan industri hilir, sehingga mendukung perkembangan wilayah dan

meningkatkan pendapatan masyarakat. Revitalisasi perkebunan juga didukung oleh berbagai peraturan pemerintah diantaranya adalah Peraturan Menteri Pertanian (PMP) Nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan.

Pola PIR adalah pola pengembangan perkebunan rakyat dengan sistem kemitraan yang memadukan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dalam satu sistem kerjasama terpadu atau koordinasi vertikal, dimana perkebunan besar bertindak sebagai inti disamping mengusahakan kebunnya sendiri juga berkewajiban membangun kebun plasma dan membeli hasil produksi kebun kelapa plasma untuk diolah lebih lanjut. Pola PIR adalah pola pengembangan yang relatif baru. Dalam pola ini PTPN memiliki kemampuan yang cukup. Perkebunan tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian; sebagian diserahkan kepada petani perkebunan (peserta PIR), dan sarana pengolahannya menjadi milik perusahaan pembangunnya. Bagian yang diserahkan kepada petani disebut "plasma", sedangkan yang menjadi milik perusahaan disebut "inti".

Di Sumatera Barat pola PIR pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, pada tahun 1982/1983. Pemerintah menunjuk PT. Perkebunan Nusantara VI dan menjadi mitra petani serta berkerjasama dengan pemerintah Jerman (GTZ) dalam pelaksanaan peremajaan sawit dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Petunjuk ini berkaitan dengan teknis dan agar dapat berjalan dengan lancar dalam rangka melestarikan lingkungan dan meningkatkan devisa negara melalui hasil produksi perkebunan. Beberapa tahun terakhir perkebunan kelapa sawit Pola PIR di Pasaman Barat ini telah masuk periode yang harus diremajakan (*replanting*).

Peremajaan merupakan pergantian tanaman tua yang tidak ekonomis lagi dengan tanaman baru. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam peremajaan kelapa sawit antara lain kapan replanting dilakukan, apa kriteria tanaman akan diremajakan, apa jenis bibit yang digunakan, dan dari mana sumber dana untuk membiayai peremajaan. Menurut Ginting dkk, (2008) pertimbangan utama dilakukan peremajaan kelapa sawit adalah umur tanaman yang akan dan telah mencapai umur ekonomis yaitu sekitar 25 tahun, tanaman tua dengan produktivitas

rendah atau di bawah 13 ton TBS/ha/tahun yang mengakibatkan keuntungan yang di peroleh oleh petani menurun.

Partisipasi petani dalam kegiatan peremajaan menggunakan sarana kelompok tani yang sudah terbentuk dan masih aktif. Kelompok tani yang dimaksud adalah kelompok yang dibentuk berdasarkan domisili atau hamparan, hal ini perlu untuk mempermudah interaksi antar anggota karena mereka saling mengenal satu sama lainnya dan tinggal saling berdekatan sehingga bila penerapan peremajaan telah dilakukan secara individu akan mudah ditiru petani lainnya.

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan kegiatan peremajaan adalah partisipasi dari petani yang mengikuti kegiatan peremajaan tersebut. Tanpa adanya partisipasi petani maka kegiatan peremajaan tidak akan berhasil karena petani merupakan pelaku utama dalam program pembangunan pertanian. Keikutsertaan petani lebih ditekankan agar petani merasa memiliki tanggung jawab untuk selalu aktif dalam kegiatan peremajaan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap menikmati hasil. Selain itu, partisipasi akan menumbuhkan rasa kemandirian pada petani yang terlibat aktif dalam kegiatan peremajaan. Sehingga nantinya petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya. Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar (Wibowo, 2011:3)

Slamet (1994:67) mengemukakan bahwa untuk dapat terjadinya partisipasi diperlukan adanya suatu kesempatan untuk berpartisipasi, ada kemauan dari individu untuk berpartisipasi dan terdapat adanya kemampuan untuk berpartisipasi. Mengambil partisipasi adalah suatu bentuk khusus di dalam pembagian kekuasaan, tugas dan tanggung jawab dalam komunitasnya. Tjodronegoro (1996) mengemukakan bahwa partisipasi akan dipengaruhi oleh kebutuhan, motivasi, struktur sosial. Orang akan berpartisipasi bila menyangkut adanya kebutuhan, mendapatkan keuntungan dan meningkatkan statusnya. Meskipun konsep partisipasi kelihatan sederhana, tetapi pada pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu sangatlah susah, rendahnya partisipasi masyarakat akan menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan. Dalam menjalankan proses partisipasi yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang terlibat. Bila

disimpulkan partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan yang nantinya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor yang merupakan kondisi-kondisi yang ada di dalam diri orang tersebut dan faktor yang merupakan kondisi yang ada pada suasana lingkungan orang yang bersangkutan (Madrie, 1986:24)

B. Perumusan Masalah

Pola PIR Bun di Pasaman Barat terdapat di lima Koperasi Perkebunan (KOPBUN) yang ada di kecamatan Luhak Nan Duo. Salah satunya KOPBUN KPS Perintis yang berkedudukan di Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo merupakan koperasi yang memiliki jumlah anggota terbanyak. KPS Perintis tergabung dalam Perkebunan Inti Rakyat yang melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit. Ophir merupakan salah satu nagari yang mengusahakan usaha kelapa sawit dan masyarakat pada umumnya merupakan anggota kelompok yang tergabung dalam KPS Perintis. Oleh karena itu, KPS Perintis berperan dalam kegiatan peremajaan kelapa sawit mulai dari permodalan, produksi dan pemasaran. Dengan berperan KPS Perintis kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kelompok KPS Perintis.

Keanggotaan dari koperasi perkebunan sawit perintis yang juga merupakan anggota kelompok yang terdiri dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 26. Jumlah anggota kelompok bervariasi dan setiap petani mendapatkan luas lahan yang sama yaitu 2 Ha. Setiap kelompok memiliki ketua dan wakil yang menyampaikan informasi yang telah dirapatkan di KPS bersama utusan dari setiap kelompok. Rapat tersebut biasanya dilaksanakan 1 kali setahun yang membahas tentang teknis yang akan dikerjakan di lapangan. Daftar petani plasma I KPS-PERINTIS tahun 2016, awal mulanya berjumlah 580 orang dengan luas areal total yakni 1.160 Ha menjadi 510 orang dengan luas areal total yakni 1.020 Ha (Lampiran 1).

Mengingat usia kelapa sawit yang sudah memasuki masa tidak produktif maka dilakukan peremajaan kelapa sawit perlu dilakukan oleh petani plasma I KPS Perintis saat ini seharusnya telah terlaksana secara keseluruhan namun hanya sebagian petani yang melakukannya. Permasalahan lainnya yang dihadapi petani saat ini adalah peremajaan merupakan suatu inovasi yang baru bagi petani,

ketakutan petani kehilangan mata pencariannya apabila tanaman kelapa sawitnya di replanting dan keterbatasan modal yang dimiliki.

Kegiatan demplot peremajaan perkebunan rakyat kelapa sawit difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan telah dilaksanakan di plasma I yang dilaksanakan di Koperasi Perintis pada tahun 2012. Replanting dilakukan di lahan petani pada tahun 2013-2014, kegiatan peremajaan pada kebun plasma dan swadaya dapat menyebabkan terhentinya pendapatan mereka. Oleh sebab itu, kegiatan peremajaan kelapa sawit bagi perkebunan harus mempertimbangkan kelangsungan pendapatan perkebunan. Selain itu, sistem peremajaan kelapa sawit untuk kebun plasma dan swadaya juga harus mempertimbangkan efisiensi biaya. Sistem peremajaan yang dianggap sesuai dengan kondisi usaha perkebunan dan direkomendasikan yaitu sistem serempak. Sistem ini dapat dikombinasikan dengan sistem tumpang sari, dengan menanam tanaman pangan di sela tanaman TBM 1 – TBM 2. Peremajaan seperti ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan pendapatan petani. Pada tahap ini diperlukan perencanaan yang matang dan terperinci untuk menghindari terjadinya kerugian selama kegiatan peremajaan. Mengatasi hal tersebut, peremajaan dapat dilakukan secara bertahap dengan membagi areal tanaman tua menjadi beberapa wilayah pengerjaan

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi petani plasma dalam peremajaan kelapa sawit di Koperasi Perintis Desa Baru Luhak Nan Duo Pasaman Barat, dengan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana kegiatan peremajaan kelapa sawit di Koperasi Perintis Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat ?
2. Bagaimana partisipasi petani terhadap kegiatan peremajaan kelapa sawit di Koperasi Perintis Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat?

Berdasarkan perumusan masalah tersebut. Untuk itu, penulis perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Petani Plasma Dalam Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Eks Pola PIR BUN di Koperasi Perkebunan Sawit Perintis PIR BUN OPHIRPasaman Barat”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka ditetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit di Koperasi Perintis Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat.
2. Mengetahui tingkat partisipasi petani plasma dalam kegiatan peremajaan kelapa sawit di Koperasi Perintis Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian bagi berbagai pihak yaitu:

1. Memberikan pengetahuan dan dapat memberikan tambahan informasi bagi dinas dan pihak terkait dalam menentukan kebijakan di masa mendatang
2. Memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti pada bidang yang sama.